

# Kolaborasi Menuju Resiliensi: Pengalaman Pemuda Ende dalam Pengurangan Risiko Bencana

Lubabun Ni'am & Hendra Try Ardianto \*)

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemuda dalam proses merancang-bangun sistem tanggap bencana yang khas dikembangkan komunitas dalam konteks pengurangan risiko bencana di Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Paupanda. Peran tersebut dilihat dari segi proses maupun hasil dalam dinamika penanggulangan bencana di Ende. Temuan penelitian ini menempatkan pemuda dalam aktivitas pengorganisasian karena mereka merupakan bagian dari entitas yang ada dalam masyarakat. Mereka terlibat aksi-aksi pengurangan risiko bencana secara kolaboratif sesuai peranan yang tepat bagi mereka. Realitas bencana di Ende menandakan kaitan antara kerentanan lingkungan hidup warga, kebijakan yang dipaksakan dari atas, dan keterbatasan akses penghidupan warga secara ekonomi. Merespons kondisi ini, para pemuda menjadi inisiator untuk memfasilitasi dialog antara warga dengan para pengambil kebijakan. Dalam situasi dan kondisi demikian, maka pemuda dalam konteks kebencanaan tidak dapat dipisahkan sebagai entitas yang ada dalam masyarakat. Kerja pemuda juga tidak mungkin hanya dibaca sebagai heroisme kelompok dan kontribusinya dalam kehidupan komunitas, tetapi semua proses sosial itu berlangsung serta terjalin secara kolaboratif diantara pemuda dan seluruh komponen di dalam masyarakat.

Kata kunci: *pemuda, resiliensi, risiko, bencana.*

## ABSTRACT

*This study attempts to explore the role of youth in the process of building community developed disaster response systems in the context of disaster risk reduction in the villages of Tanjung and Paupanda. The role of youth is analyzed in terms of the process, the results and the dynamics of disaster management in Ende. Research findings show that youth are able to organize the masses as they are considered important societal entities. Youth were involved in collaborative disaster risk reduction where roles were suited to each individual. The reality of disasters in Ende signifies the relationship between the vulnerability of the environment, 'top down' policies and limited access to resources for livelihoods. In response to these conditions, youth as initiators are able to facilitate dialogue between citizens and policy makers. In these conditions, youth cannot be perceived as separate entities in society. Youth activities cannot only be seen as group heroism and as their contributions to society, but also as collaborative social processes between youth and all components in society.*

*Keywords : youth, resilience, risk, disaster.*

---

\* Penerima Hibah Riset Studi Kepemudaan (HRSK) dari YouSure untuk Kategori Yuniior. Lubabun Ni'am adalah Redaktur Pelaksana Jurnal WACANA (INSISTPress) Yogyakarta; Hendra Try Ardianto adalah mahasiswa Pascasarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.

## PENDAHULUAN

Selama setengah dekade terakhir (2007–2012), wacana dan praktik pengurangan risiko bencana mulai kuat diterapkan dalam komunitas masyarakat di Kabupaten Ende (Nusa Tenggara Timur) secara kolaboratif (Sirimorok dan Puthut 2010: 2–11). Hal itu disebut “kolaboratif” karena membentuk jejaring aktor-aktor, mulai dari anggota masyarakat, aparat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, termasuk pemuka masyarakat setempat. Dari berbagai unsur anggota masyarakat yang berkolaborasi itu, di antara mereka terdapat elemen pemuda sebagai partisipan “gerakan”. Keberadaan kaum muda ini menarik karena menjadi kelompok yang hampir selalu aktif dan paling mampu merumuskan kerentanan masyarakat di tengah kompleksitas sosial dan ekologi yang terus berubah.

Namun, mengapa Ende? Mengapa pula kaum muda? Dalam konteks merancang-bangun sistem penanggulangan bencana, Ende termasuk salah satu daerah di Indonesia yang awal dan cepat mewujudkannya. Hal itu mulai dari proses perumusan kebijakan sampai pelibatan masyarakat, yang didorong secara intensif oleh berbagai pihak. Lassa (2010b) pernah mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur termasuk daerah dengan akumulasi *knowledge hub* (pusat pengetahuan) penanggulangan bencana yang sangat positif. Hal itu ditandai dengan adanya pembelajaran yang terus-menerus dalam hal penguatan kapasitas pemerintah, dengan kolaborasi lembaga-lembaga lokal di sana, bahkan tanpa mendatangkan pihak dari luar Nusa Tenggara Timur sekalipun—walau untuk poin yang terakhir ini patut diragukan. Sampai saat ini pun, termasuk di Ende, proses akumulasi pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana terus berlangsung. Proses pelibatan masyarakat dalam praktik penanggulangan bencana di Ende bahkan disanjung dan kerap kali dipromosikan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai praktik teladan (*best practice*)

untuk tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ni'am 2012: 71).

Sementara itu, dari pengalaman dua kelurahan di Kabupaten Ende, yakni Kelurahan Tanjung dan Paupanda di Kecamatan Ende Selatan, diperoleh catatan bahwa peran pemuda sangat menonjol pada banyak penggalan proses rancang-bangun sistem siaga bencana. Dalam konteks wacana penanggulangan bencana, pemuda secara konseptual ditempatkan dalam dua posisi yang bertentangan sekaligus. Di satu sisi, pemuda masuk dalam elemen masyarakat yang rentan terkena bencana. Di sisi lain, pemuda memiliki potensi sebagai aktor sentral lantaran dia menyimpan kapasitas/mampu mengurangi kerentanan dan ancaman. Dalam konteks ini, bahkan boleh ditaruh anggapan bahwa benang kusut persoalan penanggulangan bencana merupakan perdebatan bagaimana menempatkan pemuda untuk berperan di tengah komunitas (masyarakat). Lebih-lebih, sejauh ini “orang muda hanya (dianggap sebagai) sekelompok biang masalah atau korban, kelompok orang yang tidak dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab” (Sirimorok 2010: 5).

Kajian dan rumusan kebijakan kerap berupaya menempatkan pemuda hanya sebagai objek potensial dalam proses membangun ketahanan melalui cekokan pengetahuan tentang kebencanaan dari sekolah (misalnya, baca Ronan dan Johnston 2005). Upaya tersebut bukan berarti keliru. Tetapi, hal itu sekaligus meringkas pandangan bahwa pemuda seolah bagian tersendiri dari masyarakat. Padahal, semestinya mereka harus secara kolaboratif terlibat dari proses awal pemetaan kerentanan sampai perumusan kebijakan kebencanaan. Dengan demikian, penanggulangan bencana dalam konteks ini merupakan aksi bersama di tingkat komunitas. Pengalaman pemuda di Tanjung dan Paupanda dirancang dalam kerangka yang secara metodologis menghela napas dari prinsip tersebut.

Berdasar pada latar belakang di atas, peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang peran pemuda dalam proses merancang-bangun sistem tanggap bencana yang khas dikembangkan komunitas dalam konteks pengurangan risiko bencana di Tanjung dan Paupanda. Dari persoalan itulah, penelitian ini melihat peran kaum muda, baik dari segi proses maupun hasil, dalam dinamika penanggulangan bencana di Ende dengan mengacu pada pengalaman dua kelurahan tersebut.

### **BENCANA, RESILIENSI, DAN PEMUDA**

Definisi bencana kini sangat cair, bukan lagi soal bencana alam saja. Tetapi, dikatakan “bencana” jika eskalasi persoalan sudah meluas dan membawa dampak merugikan terhadap kehidupan komunitas. Virus flu burung yang pernah menyeruak pada awal 2000 menjadi persoalan besar karena jumlah korban kian meluas di berbagai belahan dunia. Bencana lumpur Lapindo pun, yang merupakan kesalahan manajemen teknologi (*man made disaster*), membuat kehidupan puluhan ribu orang di Sidoarjo menderita (Prasetya dan Batubara 2010). Ketika bencana hadir, masyarakat yang terbiasa hidup dalam keadaan normal mengalami goncangan serius, baik secara individu, keluarga, maupun relasi sosial yang melingkupinya.

Bencana juga tak sekadar persoalan penderitaan. Hal lain yang lebih urgen adalah bagaimana mengembalikan korban ke kondisi normal seperti sebelumnya (*bouncing back*). Sebab, saat bencana terjadi, hampir seluruh tatanan kehidupan berubah 180 derajat. Secara fisik dan psikologis, orang tidak bisa lagi melakukan berbagai hal seperti rutinitas biasa. Pada titik ini, orang kemudian berpikir bagaimana membangun ketahanan terhadap bencana. Dalam konteks Ende, di mana masyarakat tinggal di bibir pantai (Laut Flores) juga

kawasan gunung berapi (Gunung Iya), tentu menghindarkan diri dari bencana merupakan aksi menentang alam. Sebab, bencana longsor, banjir, gempa, bahkan tsunami telah berulang kali menyapa sejak nenek moyang mereka disana. Untuk itu, hal yang mungkin dilakukan yakni membangun resiliensi (daya lenting) terhadap bencana yang setiap saat bisa datang mengancam kehidupan.

Namun, bagaimana membangun resiliensi? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, apa “resiliensi” itu pun perlu penjelasan. Resiliensi merujuk pada kemampuan individu, kelompok, termasuk masyarakat untuk menghadapi, mencegah, dan meminimalkan permasalahan yang mengganggu keadaan normal, bahkan menjadikan permasalahan menjadi bagian dari normalitas sehari-hari. Dalam konteks bencana, nukilan Irwan Abdullah (2008: 19) patut dipinjam di sini. Baginya, “suatu bencana, karenanya, tidak harus mengganggu stabilitas, menyebabkan ketidakpastian, kekacauan atau runtuhnya sistem sosial budaya, merusak kemampuan adaptasi masyarakat, serta membahayakan sistem pandangan dunia.”

Dalam bangunan resiliensi yang sedang dirancang di Ende, komunitas memainkan peranan sentral dalam keseluruhan wacana kebencanaan. Mengapa komunitas? Sebab, masing-masing komunitas memiliki cara sendiri-sendiri dalam menghadapi bencana, tergantung pada karakter daerah, tatanan sosial budaya, dan berbagai faktor lain yang melekat di dalamnya. Tetapi, inti dari resiliensi tetap sama, sebagaimana dipaparkan Ride dan Bretherton (2011: 7): *community resilience* itu bertitik tolak pada bagaimana membangun “kapasitas masyarakat dalam mengatasi keadaan darurat, terutama untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman sehingga struktur fisik, sosial, dan politik yang baru bisa selaras dengan kondisi lingkungan”.

Untuk mendorong ketahanan komunitas dalam konteks kebencanaan inilah, peranan pemuda akan dielaborasi. Sebab, sebagaimana diingatkan oleh Sirimorok (2010: 7), “partisipasi orang muda masih kabur dan cenderung mengekor pada konstruksi orang dewasa”. Padahal, pemuda itu memendam cara tersendiri dalam memahami sekaligus melakukan suatu tindakan, tidak terkecuali dalam konteks kebencanaan. Meski begitu, kami tidak hendak berambisi untuk “mengemas” pemuda menjadi sosok heroik yang sanggup menyelesaikan berbagai perdebatan dan persoalan sosial karena pandangan semacam itu justru menjadikan eksistensi pemuda terjerembap pada sebuah orientasi klise.

Asriani dan Puspitasari (2011: 127) pernah dengan meyakinkan menyatakan bahwa “kelompok pemuda benar-benar mewujudkan sebagai agen perubahan yang membangun seluruh tatanan sosial masyarakat ke arah lebih baik”. Argumen ini bukan salah, tetapi semakin menempatkan pemuda keluar dari entitas komunitasnya. Apabila sejauh ini pendapat umum tentang pemuda itu melihat mereka sebagai bagian dari persoalan karena belum bisa bertanggung jawab atas tindakan, maka tampaknya tulisan tersebut berusaha membantah dengan argumen kemahaunggulan pemuda. Argumen ini berarti tetap menempatkan kelompok pemuda berhadapan-hadapan (*vis a vis*) dengan kelompok dewasa. Kami, dalam penelitian ini, lebih berfokus pada proses dan hasil bagaimana pemuda menempatkan diri secara kolaboratif di tengah komunitas dalam konteks merancang-bangun sistem ketahanan terhadap bencana.

## **KERANGKA PENANGGULANGAN BENCANA: DARI GLOBAL HINGGA LOKAL**

Sebelum menguraikan pengalaman praktik pemuda dalam penerapan sistem tanggap

bencana di Kabupaten Ende, bagian ini hendak menarik konsep dan praktik dalam kerangka penanganan bencana secara global hingga lokal. Betapapun gegap gempita pengurangan risiko bencana di Indonesia—atau Asia-Pasifik sebagai kawasan paling rawan di dunia (World Bank 2012)—harus dibayar terlebih dahulu dengan ribuan korban tewas akibat terjangan tsunami Samudra Hindia pada 2004 (Lassa 2008), seruan akan penanganan bencana bukan wacana dan praktik baru yang muncul di masa-masa mencengangkan itu. Dalam alur sejarah negara-negara bekas jajahan, Indonesia termasuk di dalamnya, pemerintah kolonial sebenarnya pernah mengujiterapkan perangkat kebijakan untuk menanggulangi serta mengurangi risiko bencana (untuk kasus Indonesia, lihat Lassa 2010a: 92–132).

Sekalipun bukan wacana dan praktik baru, terdapat beberapa momen puncak yang menandai menguatnya wacana pengurangan risiko bencana selama beberapa dekade terakhir ini. Yakni, satu dekade internasional tentang penanggulangan bencana yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang 1990–1999 dengan konsep *International Decade for Natural Disaster Reduction* (IDNDR). Menurut Robert Hamilton (dalam Lassa 2008), mula-mula ide IDNDR dicetuskan oleh sekelompok ilmuwan dan insinyur yang merasa bahwa bidang pekerjaan teknis mereka sanggup memberikan sumbangan yang berarti dalam penanggulangan bencana. Upaya ini rupanya memiliki nilai signifikansi yang meluas bukanlah karena evidensi upaya konkret atas anggapan mereka terbukti dengan menghasilkan pengaruh yang konstruktif, tetapi karena tingkat bencana alam di level global pada periode tersebut memang semakin meningkat.

Sampai kemudian pada *World Conference on Disaster Reduction* di Kobe, Hyogo, Jepang, diputuskanlah *Hyogo Framework*

*for Action* (HFA) 2005–2015. Konferensi ini digalang oleh United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). HFA pun memunyai kekuatan seruan yang memekik karena menaruh argumentasi bahwa bencana merupakan ancaman yang dapat meluluhlantakkan hasil pembangunan yang selama ini dicapai oleh berbagai negara di dunia, baik di negara maju dan lebih-lebih negara berkembang (UNISDR 2012). HFA jalan seiring dengan seruan global tentang perubahan iklim di mana negara berkembang dianggap lebih dapat menjaga dunia dari ancaman bencana alam yang lebih parah, betapapun sumber pencemaran karbon utama justru terjadi di kawasan negara maju. Keterpaduan inilah yang akhirnya membawa peningkatan bantuan global ke negara-negara berkembang agar ramah terhadap pengurangan risiko bencana. Prinsip pertama HFA menekankan penempatan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional.

Untuk Indonesia, puncak penghargaan dunia terhadap prioritas nasional itu mulai berwujud dari penghargaan dunia atas keberhasilan upaya pengurangan dampak bencana kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan penghargaan Sawakawa Laureate kepada Eko Teguh Paripurno (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta) dari UNISDR, hingga penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah *The 5<sup>th</sup> Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction* (AMCDRR) pada Oktober 2012. AMCDRR kali ini merupakan konferensi se-Asia-Pasifik yang dianggap paling berhasil karena dihadiri paling banyak pejabat menteri (dua puluh empat menteri se-Asia), yang dibandingkan pergelaran sebelumnya. Dalam AMCDRR ini, dihasilkanlah “Yogyakarta Declaration” yang berisi ide untuk menempatkan komunitas sebagai investasi utama penanggulangan bencana. Seruan investasi ini dapat dianggap sebagai pesta besar bagi negara kawasan Asia-Pasifik,

termasuk juga Indonesia, karena sepertinya setelah ini akan terjadi hujan intervensi soal pengurangan risiko bencana, sebelum periode HFA berakhir pada 2015.

Sedangkan untuk konteks lokal Nusa Tenggara Timur, praktik rancang-bangun sistem penanggulangan bencana yang dimaksud penelitian ini sebenarnya merujuk pada sebuah program di bawah aliansi *Partnership for Resilience* (PFR), yang pelaksanaannya yakni jaringan Indonesian Society for Social Transformation (INSIST) (*insist.or.id* 5 September 2012). Di Ende, terdapat lembaga masyarakat sipil lokal jaringan INSIST, yakni Flores Institute for Resource Development (FIRD), sebagai mitra pelaksana program PFR ini. FIRD punya reputasi menjanjikan dalam mendorong legislasi penanggulangan bencana di Ende dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende. Dalam praktik program PFR ini, tampaknya sebagian gagasan terinspirasi dari teknik *participatory rural appraisal* (PRA) dari karya klasik Robert Chambers, *PRA: Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif* (1996). Karena itu, pelibatan berbagai aktor yang ada di komunitas menjadi konsentrasi lebih luas dalam penelitian ini.

Namun, jauh sebelum itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pengalaman cukup panjang dalam praktik pembelajaran partisipatif. Tren ini ditandai dengan hadirnya Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS). Dalam hasil penelitian Christine Wulandari (2007), ditunjukkan bahwa Forum DAS ini merupakan salah satu rujukan berbagai daerah dalam hal pengelolaan DAS secara terpadu dan multipihak. Selain itu, terdapat Perkumpulan Masyarakat Peduli Bencana (PMPB) Kupang (Nakmofa dan Lassa 2009). Dalam kelompok ini, terdapat orang-orang yang memiliki konsentrasi pada studi NTT dengan mengeluarkan *Journal of NTT Studies*, walaupun penerbitan jurnal

ini secara institusional tak jauh berbeda dari model pengelolaan program, yang bisa tersendat bersamaan dengan cabutnya donor.

Kekhasan NTT dalam rancang-bangun sistem penanggulangan bencana sebenarnya telah melampaui banyak daerah lain di Indonesia. Jauh sebelum terjadi tsunami Aceh pada 2004 dan gempa bumi Yogyakarta pada 2006, PMBP Kupang sudah mengirimkan delegasi ke *Asian Disaster Preparedness Centre* di Bangkok, mulai dari 1998 hingga 2000, untuk belajar mengenai praktik pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Bahkan, hentakan kesadaran terhadap bencana, setidaknya di kalangan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur, mulai merembet semenjak terjangan gempa bumi dan tsunami pada 1992 (Lassa 2010b; Lassa 2009). Setelah itu, kalangan universitas mulai menginisiasi pusat kajian mitigasi bencana, seperti Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang. Hal ini jauh melampaui Universitas Gadjah Mada, misalnya, yang barulah belakangan ini memiliki studi pascasarjana tentang kebencanaan. Pada segi tertentu, termasuk dalam merespons ancaman di atas formasi geologis Indonesia yang rentan bencana, inisiatif memang tidak melulu merujuk ke Jawa.

## **MULTIDEFINISI KERAWANAN BENCANA DI ENDE**

Membaca tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Ende merupakan tilikan menarik karena terdapat “multidefinisi” tentang kerawanan dari masing-masing aktor. Definisi yang disusun digunakan untuk memberikan pembenaran ilmiah dan argumentasi taktis untuk ditindaklanjuti dalam praktik-praktik penanggulangan bencana. Beberapa pihak yang tercatat memberikan definisi tersebut antara lain BNPB, Badan Geologi, parlemen di tingkat kabupaten, lembaga swadaya masyarakat lokal beserta

jejaringnya (FIRD, INSIST), juga dapat dilacak ke memori kolektif tentang hantaman bencana dari warga masyarakat. Multidefinisi itu beranjak dari metodologi yang berbeda, kepentingan yang tentu berbeda, dan paparan serta ekspresi tentang kerawanan yang beragam. Definisi di sini bukanlah makna dari “bencana” itu sendiri sebagai sebuah konsep, tetapi lebih pada rujukan atas kerawanan sejauh yang dapat identifikasi masing-masing aktor.

BNPB (2011) memeringkat tingkat kerawanan bencana di Ende dalam kategori tinggi (ranking nasional 160 dari 494 kabupaten di Indonesia). Kerawanan tersebut dapat disinkronkan dengan jenis bahaya bencana yang dilansir Badan Geologi dalam sebuah publikasi hasil kerjasama Badan Geologi Indonesia di bawah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) dengan German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR). Badan Geologi (2012) mencatat bahaya alam yang pernah menimpa kawasan Ende merentang dari longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan luapan sungai. Hal itu tidak terlepas dari topografi Ende sebagai kawasan dengan gunung-gunung tinggi (beberapa puncak gunung melebihi 1.700 meter di atas permukaan air laut) yang umumnya memiliki lereng curam dengan beragam ancaman bencana (periksa juga Sutawidjaja dan Sugalang 2007; Saputra *et al.* 2010; Sutawidjaja 2011).

Walaupun tidak didasarkan pada laporan dengan metodologi yang valid untuk diverifikasi, tetapi DPRD Kabupaten Ende memiliki uraian yang juga panjang tentang risiko bencana yang telah teridentifikasi di Ende. Pertama, bencana alam, yang meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, aliran debris, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin ribut. Kedua, bencana nonalam, yang mencakup kejadian luar biasa atau KLB (demam berdarah,

malaria, diare, gizi buruk, antraks, rabies, dan flu burung), penyakit hama tanaman, kegagalan teknologi, dan kebakaran (hutan, lahan, rumah, bangunan). Ketiga, bencana sosial, termasuk di dalamnya kerusuhan, konflik sosial, dan sengketa tanah. Hal itu tertuang, misalnya, dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun DPRD Kabupaten Ende (April 2011) maupun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana 2009–2011.

Di dalam sebuah forum, orang DPRD menyatakan bahwa Ende merupakan etalase mini bencana Indonesia (Ni'am 2012: 60). Mereka menyatakan bahwa kawasan Ende rentan terkena dampak perubahan iklim sekaligus memiliki tingkat kesenjangan ekonomi dan ketergantungan sumberdaya yang tinggi. Laporan yang cukup detail, dengan berbasis survei kuantitatif dan pengamatan mendalam tentang ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim pernah disusun oleh INSIST. Sedangkan FIRD punya gambaran yang tidak jauh berbeda dengan uraian yang tertulis di dokumen-dokumen resmi tentang penanggulangan bencana yang disusun DPRD Ende. Hal itu tidak mengherankan karena antara FIRD dan DPRD Ende ada hubungan yang erat dan saling menyokong selama proses rancang-bangun sistem penanggulangan bencana di Ende (Sirimorok dan Puthut 2010: 144–153; Ni'am 2012).

Di level kabupaten, ancaman bencana praktis sudah terpetakan dan teridentifikasi. Di level kampung, ancaman bencana itu kerap tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari itu. Di Tanjung, misalnya, terdapat lebih dari tiga ancaman bencana. Hunian warga pesisir di sana dihipit perbukitan di sebelah utara yang tidak didukung dengan penghijauan yang cukup sehingga rawan longsor. Di sisi selatan, perumahan penduduk terancam gelombang laut dan abrasi karena sebagian rumah berada persis di tepi pantai. Warga di

kampung-kampung yang pernah merasakan terjangan bencana kerap tidak mudah untuk melupakan memori buruk tersebut. Memori kolektif yang tersimpan dari ingatan warga cukup membantu buat mendeteksi bahwa kearifan lokal itu merupakan produk pengetahuan yang dinamis, dalam arti bisa tidak sesuai dengan warisan yang diketahui sebelumnya, tetapi sangat memungkinkan untuk diperbarui (sebagai perilaku akumulasi pengetahuan) kepada generasi penerus.

Hal itu, semisal, terlacak dari refleksi Ronny So, seorang aktivis FIRD, yang sejak 1990-an terlibat aktif dalam kegiatan advokasi di beberapa lembaga swadaya masyarakat di Flores. Refleksi itu terkait bencana banjir dan tanah longsor dahsyat yang terjadi pada 2007 di Kabupaten Manggarai, kabupaten yang terletak di barat Pulau Flores. Bencana itu dianggap Ronny sebagai bencana yang paling menggema. Bencana itu benar-benar membawa dampak penghancuran. Dia melukiskan kehancuran rumah, tanaman kopi, termasuk juga kebun dalam waktu hanya dua hari. Dia akhirnya menunjukkan betapa kearifan lokal yang tertanam secara kolektif sedang berada pada titik paling rapuh saat itu. Dia memaparkan hal itu dengan membandingkan perkataan seorang warga (Ni'am 2012: 62–63):

*“Kamu tidak ada ceritakah secara adat kalau hujan sekian hari, kita harus bagaimana?” Mereka bilang, ‘Kalau sudah empat hari, kami diperingatkan. Kalau enam hari, harus lebih waspada. Delapan hari, artinya kita harus mengungsi. Ini belum sampai apa yang diceritakan nenek moyang itu. Baru dua hari, sudah amblas. Kearifan-kearifan apalagi yang harus kami patuhi?’”*

Kearifan lokal tentang kebencanaan, sekalipun itu kolektif, tetapi amat spesifik pada diri komunitas tertentu. Penggalan refleksi tersebut hanya satu contoh, yang tentu dengan demikian dapat dijabar ribuan kasus tentang kerapuhan setiap kearifan

lokal, di tengah perubahan sosial dan ekologi. Meskipun demikian, kerapuhan dan kerawanan yang kian jelas teridentifikasi merupakan basis pengetahuan yang memicu komunitas untuk ikut merancang-bangun sistem penanggulangan bencana.

## **KOLABORASI PEMUDA ENDE DALAM PRB**

Tanjung dan Paupanda termasuk kawasan “*ata Ende*” atau “orang Ende”—istilah ini merujuk pada “komunitas pesisir”. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada pagi hari, warga pergi ke laut atau ke kebun. Menurut penelusuran FIRD, kerentanan pertama yang menganga begitu lebar dari Tanjung dan Paupanda adalah gelombang pasang dan abrasi pantai. Di Tanjung, ada 79 kepala keluarga, 209 dari 2.604 jiwa yang terancam. Di Paupanda, 62 rumah, 309 jiwa, 154 anak-anak, 19 lansia, dan 2 penyandang cacat. Itu belum lagi perilaku menjaga kebersihan lingkungan yang masih minim, juga terbatasnya akses untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang sehat. Dua kelurahan itu hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari pusat Kota Ende. Meskipun dua kawasan ini berada di pinggir kota, dalam bahasa warga sekitar, “Kami ini pinggir kota yang dipinggirkan.”

Rumah penduduk yang dibangun di tepian pantai juga sangat rentan karena berdiri di atas tanah hasil tumbukan pasir yang dibawa gelombang laut. Karena itu, pemerintah desa gencar menyerukan warga untuk segera pindah. Sesuatu yang terasa berat bagi mereka karena harga tanah di kota tinggi. Sebagian warga terpaksa mengirim anak mereka, yang sebagian besar masih usia sekolah (SMP-SMA), ke luar negeri menjadi buruh migran. Uang remitan mereka lantas dikirim ke orangtua masing-masing untuk membeli tanah dan membangun rumah. Pada 2010, minimal ada delapan belas anak. Rata-rata menipu

umur supaya bisa menjadi buruh migran, umumnya ke Arab Saudi.

Realitas tersebut jelas menandakan kaitan antara kerentanan lingkungan hidup warga, kebijakan yang dipaksakan dari atas, dan keterbatasan akses penghidupan warga secara ekonomi. Merespons kondisi ini, para pemuda inisiator dari FIRD memfasilitasi dialog antara warga dengan para pengambil kebijakan. Pertemuan ini “memaksa” warga untuk langsung bicara dengan aparat pemerintah, menyampaikan kondisi dan kebutuhan senyatanya. Suatu hal yang sebelumnya menjadi penghambat bagi masyarakat. Camat, BPBD, dan anggota DPRD dihadirkan untuk berdialog dengan warga.

Dalam situasi dan kondisi demikian, maka pemuda dalam konteks kebencanaan tidak dapat dipisahkan sebagai entitas yang ada dalam masyarakat. Kerja pemuda juga tidak mungkin hanya dibaca sebagai heroisme kelompok dan kontribusinya dalam kehidupan komunitas. Tetapi, semua proses sosial itu berlangsung serta terjalin secara kolaboratif; pemuda dan seluruh komponen di dalam masyarakat. Alasan itulah yang menjadikan kami untuk tidak menempatkan pemuda sebagai aktor paling menonjol di antara kelompok masyarakat yang lain. Terlebih lagi, dalam sejumlah kasus, kaum muda justru lebih mendambakan bekerja di perusahaan multinasional yang eksploitatif terhadap lingkungan dan, dalam kasus tertentu, turut merusak dan meningkatkan ancaman terhadap bencana. Maka, apabila saat ini penulis mengangkat peran pemuda, hal itu lebih sebagai penyembulan peran pemuda dalam kemasakan besar penanggulangan bencana di level komunitas alias Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) (Lassa *et al.* 2009). Karena itu, penulis dengan sadar menempatkan pemuda bukan sebagai primadona dalam rancang-bangun sistem penanggulangan bencana.



Dengan menempatkan pemuda pada porsinya sebagai bagian dari entitas masyarakat, maka penting untuk memahami “*collaborative resilience*” (ketahanan kolaboratif) sebagaimana dituliskan oleh Goldstein *et al.* (2012). Menytir Berger dan Luckman dalam *The Social Construction of Reality* (1967), Goldstein *et al.* melihat bahwa identitas, pengetahuan, dan tatanan sosial muncul dari proses kolaboratif. Sekalipun memakai istilah “kolaboratif”, Goldstein *et al.* lebih menekankan pada *communicative resilience* (ketahanan komunikatif) untuk membentuk kembali (*reshape*) pengetahuan kolektif dan identitas komunitas.

Dalam konteks Ende, pemuda secara kolaboratif memainkan perannya melalui dua saluran, yakni jalur aksi dengan turun ke komunitas secara langsung dan jalur lobi. Jalur aksi di lapangan berguna untuk memantik perubahan sosial di komunitas terkait dengan pengurangan risiko bencana. Sementara itu, jalur lobi digunakan untuk mendorong berbagai aktor di level struktural negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menjadikan persoalan kebencanaan sebagai bagian penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Sebagaimana diketahui bahwa risiko bencana hanya bisa dikurangi kalau ada kapasitas masyarakat yang secara mandiri memiliki kesiapan atas kerentanan terhadap bencana. Kedua jalur itu tidak terpisah sama sekali, melainkan saling mengisi dan terkait satu dengan yang lain (kolaboratif).

Ada beberapa nama sosok muda yang mesti disebutkan untuk memetakan bagaimana pemuda terlibat dalam usaha pengurangan risiko bencana di Tanjung dan Paupanda. Salah satunya, Apolonius Gadho, lelaki 30 tahun yang merupakan alumnus salah satu universitas di Jakarta dan juga aktivis gerakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi penggulingan kekuasaan rezim Soeharto pada 1998. Setelah menyelesaikan

studi, dia kembali ke kampung halaman dan menekuni kerja pengorganisasian masyarakat. Ada juga Vinsensius Sangu (29) dan Maria Rosita (23). Mereka merupakan aktivis di FIRD. Vinsen merupakan alumnus salah satu perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur dan sama-sama pernah menjadi aktivis mahasiswa di satu organisasi gerakan mahasiswa dengan Ketua Komisi C DPRD sekaligus Koordinator Tim Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ende, Heribertus Gani.

Apolonius, Vinsen, Rosita, dan rekan-rekan mereka di FIRD memulai pengorganisasian bukan dengan menggurui masyarakat Tanjung dan Paupanda tentang makna bencana. Mereka mengawalinya dengan aksi langsung, semula dengan menggalakkan penanaman 5000 batang pohon mahoni (Sirimorok dan Puthut 2010: 148). Aksi ini melibatkan banyak elemen masyarakat yang sekaligus berfungsi strategis untuk mengambil hati masyarakat tentang pelestarian alam. Virus kepedulian terhadap lingkungan ini terus-menerus mereka suntingkan, seiring dengan berbagai aksi sosial lain. Jika masyarakat sudah tertular virus kepedulian alam, maka aksi-aksi lain bisa mudah bermunculan, bahkan lahir atas inisiatif masyarakat. Seperti diutarakan Vinsen dan Rosita:

*“Mereka (masyarakat) membangun tanggul pengaman kampung dengan dana yang sangat terbatas dan didukung oleh FIRD. Tetapi, seluruh tenaga, teknis gambar, dan lain-lain masyarakat sendiri yang mengoordinir .... Mereka membangun tanggul pengaman dari bambu, tali ijuk, dan karung sak semen. Lalu, karung itu diisi dengan pasir dan kemudian disusun di belakang bambu tanggul yang mereka bangun. Itu cukup menahan.”*

Setelah masyarakat sudah aktif terlibat dalam aksi gerakan lingkungan, Apolonius dan Vinsen serta rekan mereka

yang lain mulai melakukan kerja-kerja penyadaran *mindset* terhadap bencana. Mereka menggelar diskusi-diskusi tentang pengelolaan lingkungan sekitar. Mereka mengajak masyarakat untuk menghitung jumlah kerugian saat terjadi bencana. Hasilnya sangat mengejutkan warga. Ketika ada banjir, kerugian yang dialami masyarakat ternyata hampir 21 miliar lebih (Sirimorok dan Puthut 2010: 146). Dampak penghitungan itu memberi sentuhan kesadaran bagi masyarakat untuk mulai mensistematisasi gerakan pengurangan risiko bencana secara komprehensif. Dengan cara ini, maka sebenarnya warga sedang diajak untuk merefleksikan “mengapa kami harus bertahan” sehingga hal ini sekaligus dapat meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana.

Selain aksi turun langsung di komunitas, mereka juga melakukan proses lobi di tingkat struktural supaya negara, dalam hal ini DPRD dan pemerintah daerah, menyadari kewajibannya untuk menyejahterakan masyarakat. Heribertinus Gani merupakan aktor penting yang mendorong aksi-aksi pengurangan risiko bencana di Ende. Dia adalah tokoh sekaligus Koordinator Tim Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ende di DPRD. Meski gaung pengurangan risiko bencana di DPRD saat itu masih dianggap belum cukup kuat, tetapi dia dan beberapa rekannya terus memberikan dorongan supaya merampungkan naskah akademik sekaligus Rancangan Peraturan Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ende. Mereka sering turun lapangan untuk mengangkat isu pengurangan risiko bencana, baik di level konstituen maupun masyarakat secara umum.

Hubungan baik FIRD dengan aktor-aktor di eksekutif juga memiliki dampak positif guna mendorong isu pengurangan risiko bencana di Ende. Gabriel Tobi Sona (56), yang sebelumnya menjabat Kepala

Kesbangpolinmas Kabupaten Ende, memiliki kedekatan hubungan dengan para aktivis FIRD. Melalui Gabriel, dimulailah hubungan mutualisme antara organisasi masyarakat sipil dan dinas pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai aksi pengurangan risiko bencana. Forum-forum diskusi pun mulai digalakkan, yang dengan begitu mencerminkan kolaborasi antara lembaga swadaya masyarakat, dinas-dinas pemerintahan daerah, dan masyarakat. Hasil diskusi tersebut kemudian menghasilkan rumusan tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Risiko Bencana serta terbentuknya Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/TSBK) yang kemudian dikuatkan dalam Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang perlunya tim siaga di desa/kelurahan yang rawan bencana. Setidaknya sampai Maret 2012, Paupanda dan Tanjung termasuk dua dari lima belas desa/kelurahan di Kabupaten Ende yang sudah memiliki TSBD/K.

Pada tahun anggaran 2011, BPBD pun mengalokasikan dana 13.350.000 rupiah untuk pembangunan tanggul permanen di Tanjung. Di sana kini sudah terbangun tanggul 350 meter dan direncanakan akan diperpanjang 150 meter. Di Paupanda, sudah dibangun tanggul 150 meter dan akan diperpanjang 150 meter. Sebagian pembangunan tanggul ini diprakarsai warga sendiri. Jadi, di tingkat komunitas, TSBD/K merupakan sistem penanggulangan bencana yang efektif. Tim siaga semacam ini muncul dari realitas di masyarakat setempat, yang tidak bisa begitu saja dicangkokkan ke kawasan lain.

Selain itu, ada interaksi yang sublim antara warga Tanjung dan Paupanda dengan para pemuda insiator dari FIRD, yang tentu saja sangat spesifik tumbuh di dua kampung itu. Di Tanjung, ada Ruslan, pemuda yang menjabat Kepala Sie Ekonomi Kelurahan Tanjung, yang membantu memperlancar proses komunikasi dengan seluruh warga.

Di Paupanda, ada Rai, pemuda yang bergiat di Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan Paupanda. Dia pemuda yang sangat pandai mencairkan ketegangan suasana. Melalui mereka, interaksi dan inisiasi program pengurangan risiko bencana pun berjalan lancar. Makin cair suasana, makin sering mereka bergumul dan membahas (*mbabho*) ragam soal, dari kenangan tentang sejarah kampung, kerentanan yang mengancam penduduk, termasuk pula mendorong perumusan aksi-aksi tindak lanjut yang diprakarsai secara mandiri oleh warga Tanjung dan Paupanda.

### **MEMBANGUN RESILIENSI TERHADAP BENCANA**

Apakah kerja kolaboratif kaum muda dengan berbagai elemen masyarakat dalam usaha pengurangan risiko bencana—atau disebutkan secara lebih eksplisit oleh Kusumasari (2012) sebagai *networks organizations* (jejaring organisasi)—di atas membawa dampak bermakna dalam kehidupan mereka bersama? Itu adalah pertanyaan berikutnya yang mesti diuraikan, khususnya terkait dengan bagaimana bangunan resiliensi yang sedang dibentuk. Untuk itu, hal yang terpenting bukan hanya apa yang telah mereka hasilkan, melainkan juga apa yang sedang dan akan mereka kerjakan (proses). Bagaimanapun, memperkuat resiliensi bukan merupakan atraksi sulap, melainkan usaha terus-menerus yang tiada henti sekaligus selalu berproses.

Adu dua cara untuk memahami resiliensi terhadap bencana di dalam masyarakat Ende. Pertama, resiliensi yang dilihat dalam konteks kekinian, artinya mereka menyiapkan segala rancang-bangun sistem yang membuat mereka dapat bertahan atau setidaknya meminimalisasi risiko jika terjadi bencana. Kedua, resiliensi yang dimaksudkan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ada beberapa aktivitas

yang mereka kerjakan untuk merancang konsep pengurangan risiko bencana secara lebih visioner dalam rangka menyiapkan kehidupan generasi ke depan yang lebih baik. Kedua cara itu bisa dipahami dari apa yang sedang dan akan mereka lakukan.

Untuk resiliensi dalam konteks kekinian, hal ini bisa ditilik dari beberapa kegiatan. Pertama, kerja kolaboratif antara lembaga swadaya masyarakat dan TSBD/K sebagai elemen masyarakat telah menghasilkan peta rawan bencana. Peta itu dirancang bukan secara ilmiah, tapi menggunakan skala mata orang biasa, yang dibuat agar mudah dipahami. Dalam peta ini, terlihat cukup jelas ke mana dan di mana posisi arah yang dituju apabila terjadi bencana. Peta ini disebarikan ke beberapa titik yang mudah dilihat orang. Kedua, selain peta rawan bencana, juga telah disosialisasikan secara terus-menerus tentang jalur evakuasi. Berbagai acara simulasi pengurangan risiko bencana digalakkan, baik yang difasilitasi dinas-dinas pemerintahan daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun TSBD/K. Pembiasaan simulasi ini menjadikan masyarakat tidak lagi menganggap bencana sebagai horor dari luar yang tidak bisa dihindari. Sebaliknya, mereka membiasakan diri untuk menjadikan bencana sebagai bagian dari kehidupan yang dihadapi bersama. Ketiga, pembuatan mural tentang bencana secara masif juga menjadi bagian krusial untuk mendekatkan ancaman sebagai normalitas kehidupan. Mural menjadi penting karena itu merupakan bahasa komunikatif yang paling mudah diterima dan bisa menjadi *trigger* bagi masyarakat tentang makna kerawanan terhadap bencana.

Sementara itu, resiliensi yang dibangun untuk kehidupan ke depan bisa dipahami dari beberapa kerja berikut ini. Pertama, adanya dua perguruan tinggi di Ende yang sudah mengintegrasikan isu pengurangan risiko bencana ke dalam mata kuliah, yakni Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat dan Akademi Keperawatan. Lepas dari segi kualitas pengintegrasian tersebut, langkah

ini setidaknya memberikan bukti adanya kesadaran yang baik dari pihak perguruan tinggi untuk terlibat dalam isu-isu kebencanaan di Ende sehingga para alumni yang dihasilkan pun, apapun profesi mereka, memiliki sensitivitas terhadap bencana. Kedua, tidak hanya dari perguruan tinggi, di tingkat sekolah dasar juga telah diterapkan pengintegrasian serupa. Ada delapan sekolah dasar yang sudah mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana dalam beberapa mata pelajaran, di antaranya mata pelajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Cara ini terbilang sangat vital karena di usia dinilah seorang anak akan menyerap informasi guna membangun kesadaran mereka.

Kedua cara memahami resiliensi terhadap bencana ini sekaligus bisa diartikan sebagai sebuah rancang-bangun sistem kebencanaan dalam masyarakat Ende. Kerja-kerja yang mereka lakukan bukan dalam tafsiran menghindari bencana, tapi menjadikan bencana sebagai normalitas kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan bencana sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihadapi, maka masyarakat bisa meminimalisasi kerugian akibat bencana dan secara bersamaan mampu membangun kembali dari keterpurukan yang diakibatkan oleh bencana. Inilah salah satu manifestasi dari prinsip “hidup selaras dengan bencana” (*living harmony with disasters*). Di sinilah makna resiliensi terhadap bencana menemukan bukti-bukti yang relevan dan konkret.

## PENUTUP

Bencana, dalam konteks Ende sebagaimana dipaparkan di atas, begitu kompleks. Secara topografis, Ende berada di lempeng bumi yang rawan terjadi gempa bumi, juga memiliki kerentanan atas dampak letusan gunung berapi. Belum lagi dengan berbagai

persoalan lain, seperti banjir, longsor, wabah, dan bencana nonalam yang tumbuh dari lingkungan sosial-budaya. Memahami bencana memang harus melihat karakteristik fisik maupun sosial-budaya yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, proses membangun sistem siaga bencana suatu daerah sangat mungkin berbeda dengan daerah lain, termasuk peranan yang mampu diambil oleh pemuda di tengah komunitasnya.

Tulisan ini memilih untuk menem- patkan pemuda dalam kerja-kerja peng-organisasian karena mereka merupakan bagian dari entitas yang ada dalam ma- syarakat. Mereka terlibat aksi-aksi pengur- anan risiko bencana secara kolaboratif sesuai peranan yang tepat bagi mereka. Pemuda tidak mungkin melakukan segala hal dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang kompleks, termasuk dalam pe- nanggulan bencana, sendirian. Mereka harus bekerja secara kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dengan begitu, tidak ada klaim bahwa satu pihak lebih dipentingkan dalam per- soalan kebencanaan. Dari cerita kerja ko- laboratif ini menunjukkan bahwa masing- masing pihak memiliki kapasitas dan ke- mampuannya sendiri dalam merespons pe- ngurangan risiko bencana. Itu artinya, pemer-intah, NGO, atau pemuda sekalipun harus memainkan perannya sesuai dengan porsinya masing-masing.

Akhirnya yang perlu dipahami bahwa resiliensi warga terhadap bencana tidak bisa dibaca dalam konteks kekinian saja. Resiliensi merupakan proses terus-menerus yang tidak pernah usai dalam rangka membangun ketahanan warga dari bencana yang berpotensi muncul. Resiliensi dapat dibaca dari kerja, aksi, dan tindakan yang telah, sedang, dan akan mereka kerjakan. Dalam konteks kebencanaan, resiliensi merupakan usaha untuk membangun kesad- aran dan meningkatkan kapasitas warga dalam usaha pengurangan risiko bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2008) "Konstruksi dan Reproduksi Sosial atas Bencana Alam", Working Papers in Interdisciplinary Studies No. 1, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Asriani, D.D. dan D.C. Puspitasari (2011) "Modal Sosial Kelompok Pemuda dalam Proses Pengurangan Risiko Bencana" dalam M.N. Azca, S.A. Margono, dan L. Wildan (ed.) *Pemuda Pasca Orba: Potret Kontemporer Pemuda Indonesia*, Yogyakarta: YouSure.
- Badan Geologi (2012) *Analisis Bahaya Geologi dan Risiko Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur*, Bandung: Badan Geologi bekerjasama dengan German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2011) *Indeks Rawan Bencana Indonesia 2011*, Jakarta: BNPB.
- Bretherton, D. dan A. Ride (ed.) (2011) *Community Resilience in Natural Disasters*, New York: Palgrave Macmillan.
- Chambers, R. (1996) *PRA (Participatory Rural Appraisal): Memahami Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius bekerjasama dengan Yayasan Mitra Tani.
- Goldstein, B.E. (2012) "Conclusion: Communicative Resilience" dalam B.E. Goldstein (ed.) *Collaborative Resilience: Moving Through Crisis to Opportunity*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- insist.or.id* (2012) "About Partners for Resilience (PfR)", 5 September, Diakses dari <http://www.insist.or.id/node/330?page=3> pada 30 Desember 2012 pukul 16:21 WIB.
- Kusumasari, B. (2012) "Network Organisation in Supporting Post-Disaster Management in Indonesia", *International Journal of Emergency Services* 1 (1): 71–85.
- Lassa, J. (2008) "The Rise of Risk?: Where is the Resilience?", Draft untuk diskusi Oxfam GB & Partners pada 28–30 Juli 2008.
- Lassa, J. (2009) "Bencana yang Terlupakan?: Mengingat Kembali Bencana Laran-tuka dan Lembata 1979–2009", *Journal of NTT Studies* 1 (2): 159–184.
- Lassa, J., P. Pujiono, D. Pristiyanto, E.T. Pauripurno, A. Magatani, dan H. Purwati (2009) *Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)*, Jakarta: Grasindo.
- Lassa, J. (2010a) "Institutional Vulnerability and Government of Disaster Risk Reduction: Macro, Meso and Micro Scale Assessment (with Case Study from Indonesia)", Disertasi di Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität, Tidak diterbitkan.
- Lassa, J. (2010b) "Sejarah Pengetahuan PRBBK di Indonesia: Studi Kasus NTT", *Bulletin Kawasan* 26: 19–21.
- Nakmofa, Y. dan J. Lassa (2009) "Community Based Approach to Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Towards Sustainable Livelihood: Ten Years Experiences From PMPB Kupang", *Journal of NTT Studies* 1 (2): 136–145.
- Ni'am, L. (2012) "Ende: Membangun Sistem Setelah Babak Belur" dalam L. Ni'am dan I. Salim (ed.) *Merancang-bangun Sistem Keselamatan Rakyat: Pengalaman Kelola Bencana di Lima Kabupaten*, Yogyakarta: INSISTPress.
- Prasetia, H. dan B. Batubara (ed.) (2010) *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*, Depok: Desantara bekerjasama dengan Lafadl Iniatitives dan Indonesian Sustainable Energi and Environment.
- Ronan, K.M. dan D.M. Johnston (2005) *Promoting Community Resilience in Disasters: The Role for Schools, Youth, and Families*, New York: Springer.
- Saputra, S.E.A., A. Suhaimi, dan F. Mulyasari (2010) "Makrozonasi dan Mikrozonasi Kerentanan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Ende sebagai Data Dasar

- Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”, *Jurnal Geologi Indonesia* 5 (3): 171–186.
- Sirimorok, N. (2010) *Membangun Kesadaran Kritis: Kisah Pembelajaran Partisipatif Orang Muda*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Sirimorok, N. dan Puthut EA (2010) *Bencana Ketidakadilan: Refleksi Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia*, Karanganyar: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan.
- Sutawidjaja, I.S. (2011) “Potensi Bencana Gunung Api Iya, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi* 2 (2): 113–124.
- Sutawidjaja, I.S. dan Sugalang (2007) “Multi-geohazards of Ende City Area”, *Jurnal Geologi Indonesia* 2 (4): 217–233.
- United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2012), Pers rilis pada penyelenggaraan AMCDRR di Yogyakarta pada 22–25 Oktober 2012.
- World Bank (2012) Pers rilis pada penyelenggaraan AMCDRR di Yogyakarta pada 22–25 Oktober 2012.
- Wulandari, C. (2009) “Penguatan Forum DAS sebagai Sarana Pengelolaan DAS Secara Terpadu dan Multipihak”, Makalah dalam lokakarya “Sistem Informasi Pengelolaan DAS: Inisiatif Pengembangan Infrastruktur Data” di Bogor, 5 September 2007.